

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan pelayanan publik. Dalam menghadapi tantangan tersebut, selain peran pemerintah dan sektor swasta, organisasi nirlaba memiliki posisi strategis dalam menjangkau kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh negara. Organisasi nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan berfokus pada pelayanan sosial di berbagai bidang seperti pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini umumnya berasal dari sumbangan masyarakat, hibah pemerintah, serta lembaga donor. Dengan karakteristik tersebut, kepercayaan publik menjadi aset utama yang harus dijaga melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Meskipun memiliki peran sosial yang penting, banyak organisasi nirlaba di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan administrasi internal, terutama pada aspek keuangan. Menurut *Nenobais et al. (2022)*, kelemahan utama organisasi nirlaba di Indonesia terletak pada belum adanya sistem keuangan berbasis prosedur baku, sehingga proses pencatatan kas sering kali bergantung pada individu tertentu dan tidak memiliki acuan standar. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pengawasan serta absennya

dokumentasi resmi yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban. Padahal, sebagaimana dijelaskan oleh *Ong et al. (2022)*, kapasitas keuangan organisasi nirlaba harus mampu menjamin efisiensi penggunaan sumber daya dan keberlanjutan program-program sosialnya. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang terstandarisasi, terdokumentasi, dan mudah diaudit. Tanpa adanya prosedur yang jelas, organisasi akan kesulitan menghindari praktik informal, ketidakakuratan laporan, dan lemahnya sistem pengendalian internal.

Salah satu bentuk organisasi nirlaba yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan manusia adalah lembaga pendidikan anak usia dini seperti Taman Kanak-kanak (*TK*). *TK* berperan sebagai fondasi awal dalam sistem pendidikan nasional untuk mempersiapkan anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus mendorong peningkatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (*PAUD*), termasuk dari sisi kurikulum, tenaga pendidik, dan tata kelola lembaga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (*BPS*), jumlah *TK* di Indonesia terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1.

**Tabel 1. 1 Data Pertumbuhan TK di Indonesia Tahun 2022-2024**

No	Tahun	Unit
1	2022	82.845
2	2023	83.211
3	2024	83.630

Sumber: Badan Pusat Statistik (*BPS*) 2022, Badan Pusat Statistik (*BPS*) 2023, Badan Pusat Statistik (*BPS*) 2024

Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sejak usia dini. Namun demikian, pertumbuhan secara kuantitatif belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas tata kelola lembaga, terutama dalam hal administrasi dan akuntabilitas keuangan. Banyak TK yang masih dikelola di bawah yayasan kecil atau komunitas lokal belum memiliki sistem keuangan berbasis dokumen resmi. Pencatatan kas masuk dan kas keluar umumnya dilakukan secara manual menggunakan buku tulis tanpa adanya format maupun prosedur baku. Hal ini menimbulkan berbagai risiko seperti kesalahan pencatatan, kehilangan data, keterlambatan pelaporan, hingga penyalahgunaan dana. Lemahnya sistem administrasi ini juga menyulitkan pihak sekolah dalam mempertanggungjawabkan keuangan kepada yayasan, orang tua murid, maupun donatur.

Kasus penyimpangan keuangan di lembaga pendidikan bukanlah hal baru. Sebagai contoh, pada tahun 2023 terjadi kasus penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di salah satu TK di Kabupaten Lumajang. Berdasarkan laporan Kompas.com (2023), penyimpangan tersebut terjadi karena tidak adanya pembukuan resmi, lemahnya sistem administrasi, serta ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan yang menjadi acuan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tanpa adanya SOP yang jelas, lembaga pendidikan menjadi rentan terhadap kesalahan maupun penyalahgunaan dana, bahkan pada skala kecil.

Permasalahan dalam tata kelola administrasi keuangan menjadi alasan utama perlunya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di TK Islam

Ainul Yaqien Bekasi. Selama ini, kegiatan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas belum memiliki acuan atau pedoman kerja yang jelas. Akibatnya, proses administrasi keuangan cenderung berjalan berdasarkan kebiasaan individu dan belum terstandarisasi. Hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam pencatatan, keterlambatan pelaporan, serta kesulitan dalam proses pertanggungjawaban dana kepada pihak yayasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah, diketahui bahwa sistem pencatatan kas yang diterapkan masih bersifat sederhana. Penerimaan dan pengeluaran kas dicatat menggunakan buku kas tanpa format baku, sehingga informasi keuangan sering kali tidak terdokumentasi dengan lengkap. Selain itu, tanggung jawab pencatatan keuangan hanya dipegang oleh satu orang yang juga merangkap tugas harian lainnya dan tidak memiliki latar belakang di bidang akuntansi. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan keuangan menjadi kurang efisien serta rentan terhadap kesalahan pencatatan maupun kehilangan data.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan format baku laporan pengelolaan kas yang dapat digunakan oleh TK Islam Ainul Yaqien. Melalui SOP dan format laporan tersebut, diharapkan proses pencatatan, pelaporan, serta pengawasan kas dapat berjalan secara sistematis, transparan, dan mudah dievaluasi baik oleh pihak internal sekolah maupun yayasan.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa perancangan SOP keuangan dapat menjadi solusi dalam menertibkan

pengelolaan administrasi di lembaga pendidikan anak usia dini. Wahyuni (2023) menyatakan bahwa lemahnya sistem pelaporan di PAUD dapat diperbaiki melalui penerapan SOP keuangan yang memuat panduan pencatatan dan pelaporan kas. Wati et al. (2024) juga menemukan bahwa hambatan manajemen keuangan di TK dapat diatasi melalui penyusunan SOP dan penerapan laporan kas periodik, sehingga tata kelola menjadi lebih akuntabel. Hal serupa diungkapkan oleh Sidabutar et al. (2025) yang menyusun SOP keuangan pada TK Cahaya Mutiara, di mana penerapan prosedur baku berhasil menekan kesalahan pencatatan dan memperkuat transparansi dana pendidikan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Maulana et al. (2024), sistem keuangan yang baik harus menjamin kepastian, konsistensi, dan kemudahan pelaporan. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan menyusun SOP keuangan yang berfungsi sebagai pedoman teknis dan alat pengendalian internal. SOP membantu lembaga dalam mencegah kesalahan berulang, menumbuhkan budaya tertib administrasi, dan mendukung proses akreditasi maupun pengajuan bantuan dana pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melihat bahwa TK Islam Ainul Yaqien membutuhkan SOP yang dapat mengatur proses pengelolaan kas sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan laporan pengelolaan kas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada **“Perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Laporan Pengelolaan Kas Pada TK Islam Ainul Yaqien Bekasi”**.

## B. Pertanyaan Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan kas di TK Islam Ainul Yaqien?
2. Bagaimana perancangan format laporan Pengelolaan kas di TK Islam Ainul Yaqien?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tepat dan aplikatif dalam proses penerimaan dan pengeluaran kas di TK Islam Ainul Yaqien Bekasi.
2. Merancang format laporan pengelolaan kas TK Islam Ainul Yaqien Bekasi sebagai alat pelaporan keuangan yang akuntabel.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dari segi teoritis maupun praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sistem laporan kas penerimaan serta pengeluaran pada lembaga pendidikan berbasis nirlaba.

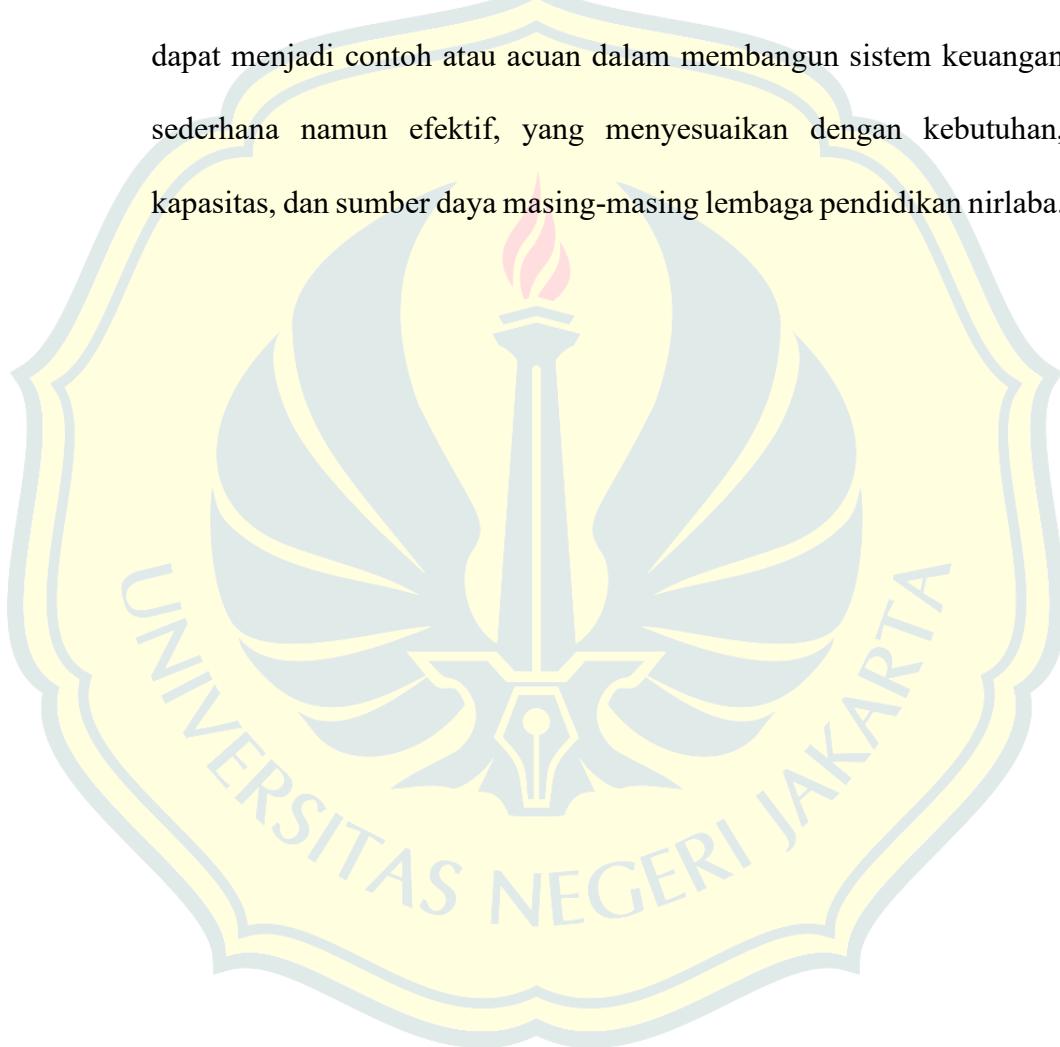
b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan studi mengenai sistem pencatatan kas dan pelaporan keuangan yang tertib, akuntabel, serta disesuaikan dengan karakteristik lembaga pendidikan skala kecil yang belum memiliki sistem keuangan terstandarisasi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak internal TK Islam Ainul Yaqien, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam pengelolaan keuangan harian, khususnya dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. SOP dan laporan kas yang dirancang diharapkan dapat menjadi acuan operasional yang efektif untuk menciptakan tata kelola administrasi yang lebih efisien, transparan, dan mudah diterapkan oleh pihak sekolah.
- b. Bagi pihak yayasan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar dalam membina dan mengawasi unit pendidikan di bawah naungannya, sehingga tercipta keseragaman prosedur keuangan antar lembaga dan peningkatan akuntabilitas dalam pelaporan dana operasional.
- c. Bagi masyarakat dan orang tua murid, adanya sistem administrasi keuangan yang tertib serta laporan kas yang transparan dapat menumbuhkan rasa percaya terhadap pengelolaan dana pendidikan di TK Islam Ainul Yaqien. Kejelasan informasi terkait aliran dana juga dapat menciptakan hubungan yang lebih terbuka antara pihak sekolah

dan orang tua, sehingga mereka merasa lebih dilibatkan dan yakin bahwa setiap kontribusi dikelola secara amanah serta digunakan untuk kepentingan pendidikan anak-anak mereka.

- d. Selain itu, bagi lembaga pendidikan serupa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh atau acuan dalam membangun sistem keuangan sederhana namun efektif, yang menyesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas, dan sumber daya masing-masing lembaga pendidikan nirlaba.



*Intelligentia - Dignitas*